

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Restoran-restoran yang terdapat di daerah Jakarta Barat yang berada di wilayah Kalideres, Cengkareng, Kembangan, Grogol Petamburan, Kebon jeruk, Taman Sari dan Palmerah yang memotong pajak restoran. Responden yang di tuju merupakan pemilik restoran atau pelimpahan wewenang dalam hal mengurus perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak restoran kepada staff keuangan, head manager, atau store manager.

Waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2011. Waktu ini diambil karena merupakan waktu yang paling efektif bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survei. Metode penelitian deskriptif adalah metode dalam melakukan penelitian atas suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1999). Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisa, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan penelitian survei adalah penyelidikan yang diadakan

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual (Nazir, 1999). Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan dimasa mendatang.

3.3. Konseptual Variabel Penelitian

1) Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu keadaan yang taat atau bersifat patuh, memiliki kata dasar patuh yang berarti selalu menurut perintah, taat pada ajaran perintah, dan mempunyai sikap disiplin (KBBI Kontemporer 2002: hal 1108).

Menurut Gunadi (2005) dalam tesis dengan judul Pengaruh Moralitas Pajak dan Budaya terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak yang dibuat oleh Eka Aryani Wardhani, pengertian dari kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan sendiri memiliki arti sebagai kepandaian, segala sesuatu yang di ketahui. Untuk perpajakan memiliki arti sebagai perihal atau segala sesuatu

tentang pajak. Sehingga pengetahuan perpajakan memiliki arti sebagai suatu hal yang diketahui mengenai pajak khususnya pajak restoran.

Supriyati dan Nur Hidayati (2008) mengemukakan informasi perpajakan dapat diperoleh langsung dari petugas pajak atau media radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak atau pelatihan pajak. Selain itu indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan dapat dilihat pengetahuan mengenai kepemilikan NPWP/NPWPD dan *system self assessment*.

3) Penerimaan pajak Daerah

Maksud dari penerimaan pajak daerah merupakan sejauh mana wajib pajak restoran menanggapi bahwa kepatuhan dan pengetahuan mereka dapat mempengaruhi dalam pemahaman penerimaan pajak daerah karena pajak restoran merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah.

3.4. Operasional Variabel Penelitian

1) Kepatuhan

Berikut ini adalah indikator-indikator variabel kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu (2003: 148-149) yang dikutip oleh Farida Aryani (majalah ilmiah rahmaniyah 2005: 16) adalah :

- 1) Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contohnya yaitu : menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebelum batas waktu akhir kepada Dinas Pendapatan Daerah
- 2) Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi kepatuhan formal. Contohnya yaitu wajib pajak mengisi SPTPD dengan jujur, baik dan benar dan menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Daerah sebelum batas waktu akhir.

Instrumen diukur dengan menggunakan skala *likert* satu sampai lima yaitu dari sangat sangat setuju = 5, setuju = 4, netral = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1 yang terdiri dari lima belas item pertanyaan yang mengukur kepatuhan wajib pajak restoran dimana item pertanyaan ke 6 dan 13 diberi skor terbalik (negatif) dengan tujuan untuk melihat konsistensi jawaban responden terhadap item pertanyaan.

2 Pengetahuan Perpajakan

Indikator pengetahuan wajib pajak dalam memperoleh informasi perpajakan dapat di peroleh dari petugas pajak dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak maupun seminar perpajakan (Supriyanti dan Nur Hidayanti:2008).

Di karenakan penelitian yang dilakukan merupakan studi terhadap wajib pajak restoran, maka pengetahuan seputar pajak restoran indikatornya menurut Marihot P. Siahaan (2005) yaitu:

1) Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

2) Obyek Pajak Restoran

Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran kecuali pelayanan usaha jasa boga dan katering.

3) Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subyek pajak yang membayar pajak. Sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

4) Tarif Pajak Restoran

Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

5) Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

6) Pelaporan Pajak dan Surat Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD dan apabila tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

7) Penetapan Pajak Restoran

Sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas Pendapatan Daerah maka bupati/walikota menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila dalam pemeriksaan SPTPD terdapat pajak daerah yang terutang tidak atau kurang bayar, tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis serta diisi dengan tidak benar. Setelah penerbitan SKPDB dan dilakukan pemeriksaan ternyata masih ditemukan data baru sehingga menambah jumlah pajak terutang maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Instrumen diukur dengan menggunakan skala *likert* satu sampai lima yaitu dari sangat sangat setuju = 5, setuju = 4, netral = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak

setuju = 1 yang terdiri dari lima belas item pertanyaan yang mengukur pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran dimana item pertanyaan ke 6,7,8 dan 12 diberi skor terbalik (negatif) dengan tujuan untuk melihat konsistensi jawaban responden terhadap item pertanyaan.

3. Penerimaan pajak Daerah

Indikator dalam penerimaan daerah ini lebih terarah terhadap pajak restoran yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, tertuang dalam Ketentuan Umum UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 22 yaitu pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Hal ini membuktikan pajak restoran sebagai salah satu komponen penyumbang pajak daerah.

- 2) Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 50 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

SPTPD ini digunakan oleh wajib pajak restoran untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutangnya yaitu pajak restoran.

Instrumen diukur dengan menggunakan skala *likert* satu sampai lima yaitu dari sangat sangat setuju = 5, setuju = 4, netral = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1 yang terdiri dari empat item pertanyaan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Mengacu pada data yang dibutuhkan dalam penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kombinasi secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan dimana dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dari buku, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.
2. Penelitian lapangan dimana dilakukan dengan teknik kuesioner atau angket yaitu data primer yang diperlukan untuk analisis statistic yang diperoleh dengan menyebar kuesioner ke wajib pajak restoran.

3.6. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling tetapi random dengan beberapa kriteria dimana akan mengambil koresponden WP Restoran yang berada di wilayah Kalideres, Cengkareng ,Kembangan, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Palmerah dan Taman Sari dengan alasan kemungkinan untuk mendapatkan data lebih mudah didapat karena terdapat *mall* atau pusat perbelanjaan.

Berikut adalah kriteria restoran tempat peneliti akan menyebarkan kuesioner adalah:

1. Restoran di wilayah Jakarta Barat yaitu Kalideres, Cengkareng, Kembangan, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Taman Sari, dan Palmerah.
2. Restoran yang memotong langung pajak 10% kepada pelanggannya.

3.7. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu:

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data langsung dilapangan dimana penulis mengadakan penelitian ke Kantor Akuntan Publik untuk memperoleh data yang dibutuhkan, seperti mengumpulkan data identitas para responden yang diberikan kuesioner.

2. Angket atau *Questioner*

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat ditentukan skornya. Salah satu cara yang sering digunakan dalam menentukan skor adalah dengan menggunakan skala *Likert*. Bentuk skala *Likert* memiliki lima kategori. Apabila dirangking maka susunannya akan dimulai dari sangat tidak setuju sampai kepada sangat setuju.

Maka dari itu jawaban dari setiap item dalam variabel penelitian yang menggunakan skala *Likert* mempunyai tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata dan akan diberi skor 1 sampai 5. Untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut :

Apabila responden menjawab (sangat setuju) diberi nilai 5. Apabila responden menjawab (setuju) diberi nilai 4. Apabila responden menjawab (netral) diberi nilai 3. Apabila responden menjawab (tidak setuju) diberi nilai 2. Apabila responden menjawab (sangat tidak setuju) diberi nilai 1.

3.8. Metode Analisis

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena analisis data merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan yang telah dibuat, maka metode yang digunakan dalam menganalisis data antara lain :

3.8.1. Uji Kualitas Data

Kriteria utama yang digunakan untuk menilai suatu alat pengukuran ialah validitas (ketepatan) dan reabilitas (keandalan). Validitas merujuk kepada sejauhmana suatu uji dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin kita ukur. Reabilitas berkaitan dengan ketepatan dari prosedur pengukuran. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan tugasnya sebagai alat ukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengikuti kaidah *product moment*(r) yaitu : uji validitas dengan metode ini merupakan uji validitas item, dasar kerjanya dengan komputerasi korelasi antar setiap item dengan skor total test sebagai kriteria validasinya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai suatu instrument dinyatakan valid apabila harga koefisien $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan jika semua item dalam variabel yang digunakan adalah valid, begitu juga sebaliknya.

2) Uji Reliabilitas

Suatu pengukur adalah andal sepanjang pengukur tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten. Uji reliabilitas (kehandalan) ditujukan untuk mengetahui sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (reliabel). Suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (konsisten atau stabil dari waktu ke waktu), maksudnya ada toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran. Untuk mengukur reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α), yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$ (Nunnally, 1960 dalam Ghazali, 2006).

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normal atau tidaknya model regresi dapat menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability plot.

2) Uji multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF) serta korelasi antar variabel bebas, dimana suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10 serta memiliki tingkat korelasi antar variabel bebas dibawah 90% . (Ghazali, 2006).

3) Uji heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghazali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Glejser*, dimana model regresi bebas dari heteroskedastisitas dibuktikan

dengan nilai variabel bebas berada di atas 0,50 yang berarti nilainya tidak signifikan.

3.8.3. Uji Hipotesis

Pembentukan suatu hipotesis memerlukan teori-teori terlebih dahulu sebagai pendukung pernyataan hipotesis yang diusulkan. Analisis regresi berganda dilakukan bila jumlah variabel bebasnya minimal dua (lebih dari satu).

- 1) Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{PPD} = a + b_1 \text{KWP} + b_2 \text{PP} + \dots + b_n X_n$$

Dimana :

- PPD = Penerimaan Pajak Daerah ;
 a = konstanta regresi ;
 b = koefisien regresi ;
 KWP = Kepatuhan Wajib Pajak;
 PP = Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak

- 2) Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau, $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, artinya apakah semua variabel

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau $H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k = 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan $df = (n-k) (k-1)$, dimana n = jumlah sampel, k = jumlah variabel. Kemudian dilakukan perbandingan dengan F_{hitung} untuk menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan ketentuan : H_0 diterima apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ dan H_0 ditolak apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$.

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau : $H_0 : b_i = 0$, artinya apakah suatu variabel independen bkan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : $H_a : b_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5% dengan $df = (n-k)$ untuk menentukan nilai t_{tabel} . Dilakukan perbandingan dengan t_{hitung} untuk menentukan H_0 ditolak atau diterima, dengan ketentuan : H_0 diterima apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$

4) Analisis Determinasi

Dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara serentak terhadap variabel penerimaan pajak daerah. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen.

Tabel 3.1

KISI-KISI FINAL PENYUSUNAN INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

Variabel Penelitian	Indikator	Banyaknya Butir	Nomor Butir	Sumber Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Formal	7	1,4,5,6,,12,14,15	Safri Nurmantu(2003:148-149)yang dikutip oleh Farida Aryani (majalah ilmiah rahmaniyah 2005:16)
	Kepatuhan Material	8	2,3,8,9,7,10,11,13	
Pengetahuan Perpajakan	Informasi Perpajakan	2	1,2	Supriyati dan Nur Hidayanti. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Surabaya:STI E Perbanas
	Pengertian Pajak Restoran	1	3	Marihot P. Siahaan.Pajak Daerah da Retribusi Daerah.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
	Obyek Pajak Restoran	1	6	
	Subyek dan Wajib Pajak Restoran	2	7,8	
	Tarif Pajak	2	4,5	

	Restoran			
	Pengukuhan Wajib Pajak Restoran	1	9	
	Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPD)	2	11,12	
	Penetapan Pajak Restoran	4	10,13,14,15	
Penerimaan pajak daerah	Pajak Restoran	3	1,2,4	UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	1	3	